

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi negeri yang berorientasi pada pendidikan vokasional, di mana proses pembelajaran difokuskan pada penguasaan keterampilan praktis dan kompetensi profesional. Dalam sistem pendidikan vokasi, pembelajaran tidak hanya dibekali teori di ruang kelas, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Melalui pengalaman kerja tersebut, dapat memahami secara langsung dinamika dan tanggung jawab di dunia kerja profesional.

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran berbasis praktik adalah kegiatan magang. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari kurikulum Politeknik Negeri Jember yang menjadi syarat kelulusan. Program magang dirancang agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori di lingkungan kerja sesungguhnya. Dalam kegiatan magang, di dapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori di lingkungan kerja sesungguhnya. Dalam kegiatan magang, ditempatkan pada instansi yang relevan dengan bidang studinya untuk melaksanakan tugas selama 720 jam atau setara dengan 20 SKS dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan. Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi antara tugas dan fungsi dengan ilmu yang dipelajari dalam Program Studi Akuntansi Sektor Publik, terutama terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran negara. Melalui kegiatan ini, di peroleh kesempatan untuk memahami mekanisme kerja instansi pemerintah secara langsung serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan di tingkat wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa bidang yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bidang tersebut adalah Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan anggaran, khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, salah satunya melalui Dana Desa. Dana Desa menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJPb berperan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana desa guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan oleh pemerintah daerah.

Proses monitoring dan evaluasi Transfer ke Daerah, khususnya Dana Desa, melibatkan tahapan yang cukup kompleks, mulai dari pengumpulan data penyaluran, pengolahan dan analisis data, pelaksanaan monitoring secara administratif dan lapangan, hingga penyusunan laporan serta rekomendasi tindak lanjut. Kompleksitas tersebut menuntut adanya penyajian alur kerja yang sistematis agar setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat ditelusuri secara jelas. Oleh karena itu, dalam laporan ini mekanisme monitoring dan evaluasi Dana Desa tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga disajikan dalam bentuk flowchart sebagai alat bantu visual untuk menggambarkan alur pelaksanaan kegiatan secara runtut dan terstruktur.

Untuk mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi Transfer ke Daerah terkait Dana Desa maka disusunlah laporan dengan judul **“Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah Dana Desa pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat”**. Untuk memahami secara langsung mekanisme pengawasan penyaluran Dana Desa sebagai salah satu wujud implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat di tingkat daerah.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan instansi pemerintah serta memahami penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Melalui kegiatan magang ini, diharapkan dapat :

- a. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap proses pengelolaan keuangan negara.
- b. Membandingkan dan mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja.
- c. Menumbuhkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika kerja dalam melaksanakan tugas di lingkungan instansi.
- d. Beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi pemerintahan, khususnya dalam bidang perbendaharaan negara.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan Khusus dari Kegiatan Magang ini berfokus pada topik laporan akhir yang berjudul “Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) Dana Desa Pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat”. Adapun tujuan khususnya yaitu :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II)
- b. Menganalisis mekanisme monitoring dan evaluasi Transfer ke Daerah (TKD), Khususnya Dana Desa.
- c. Mengolah dan menganalisis data keuangan dan ekonomi daerah.
- d. Mendukung pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program pemerintah.
- e. Mengembangkan keterampilan administratif, analitis, dan komunikasi.

1.2.3 Manfaat Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah pengalaman dan pemahaman mengenai mekanisme kerja instansi pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara.
- 2) Menumbuhkan sikap profesional, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam bekerja.
- 3) Memperluas wawasan tentang penerapan kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah melalui Dana Desa.

b. Bagi Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

- 1) Mendapatkan dukungan tenaga dalam kegiatan administratif dan teknis yang berkaitan dengan pengolahan data serta pelaporan monitoring Dana Desa.
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan negara.

c. Bagi Politeknik Negeri Jember

- 1) Memperluas jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah sebagai tempat pelaksanaan magang.
- 2) Meningkatkan reputasi institusi sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan lulusan siap kerja di bidang pemerintahan dan keuangan publik.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan Magang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Diponegoro No.59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115. Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan selama empat bulan dilaksanakan dari tanggal 01 September 2025 samapi dengan 31 Desember 2025.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan magang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan selama periode 01 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan total waktu magang selama 720 jam. Jam operasional kantor dimulai pukul 07.30 – 17.00 WIB, disertai dengan kehadiran absensi melalui BKPM serta absensi internal pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II.

Kegiatan magang dilaksanakan di Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), dengan pembimbing lapang dari Seksi PPA II C. Tugas yang dilaksanakan selama pelaksanaan magang diberikan oleh seluruh seksi yang ada di Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), yang terdiri dari Seksi PPA II A, Seksi PPA II B, Seksi PPA II C. Seluruh kegiatan dan tugas yang diberikan setiap harinya dilaporkan di logbook bulanan yang berisi uraian pelaksanaan magang, input serta output yang dihasilkan. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan selama magang.

Tabel 1. 1 Kegiatan Magang Kanwil DJPb Jawa Barat

Tanggal	Tempat	Tugas	Penanggungjawab
01 September-31 Desember	Seksi PPA II A	a. Meringkas tugas dan fungsi PPA II (Kajian Fiskal Regional) b. Mengerjakan kertas kerja data BAB 1 KFR Triwulanan c. Melakukan perbandingan/ kesesuaian antara Laporan Asset and Liabilities Commite (ALCo) Regional Provinsi Jawa Barat dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (setiap bulan) d. Pembuatan desain baru PPT Laporan Assets dan Liabilities commite e. Pembuatan desai laporan kebermanfaatan f. Merekap data ekonomi berdasarkan data yang ada pada BPS g. Mengikuti rapat deputies ALCo regional jawa barat h. Mengecek dan memperbaiki laporan kebermanfaatan i. Mengikuti rapat desiminasi Kajian Fiskal Regional j. Mengikuti /hadir dalam pelaksanaan GKM terkait Data Analytic pada	Lutfie Akmal Muradief

		<p>ALCo dan internalisasi pasca pelatihan Change management</p> <p>k. Memasukkan data yang ada di BPS ke PPT ALCo</p> <p>l. Mendesain kajian fiskal regional triwulan IV</p> <p>m. Mengelompokkan data PDRB ADBH tahunan dan triwulanan</p> <p>n. Latihan penulisan Ilmiah</p> <p>o. Mengisi dan mencari data di BPS terkait Bauran Intervensi Fiskal dan Kebijakan lainnya berkorelasi dengan kondisi makroekonomi Jawa Barat Pada Bulan Oktober</p> <p>p. Mengerjakan Laporan LPE sisi Produksi / Lap Usaha tw3-2025</p> <p>q. Merekap data ekspor non migas 10 golongan utama & laju pertumbuhan ekonomi ke Kertas Kerja KFR triwulanan</p> <p>r. Merekap data impor non migas 10 golongan utama & laju pertumbuhan ekonomi ke Kertas Kerja KFR triwulanan</p>	
01 September–31 Desember	Seksi PPA II B	<p>a. Meringkas tugas dan Fungsi PPA II (KUR , UMi dan KDKMP)</p> <p>b. Pembuatan Cover laporan Perbendaharaan Triwulan III tahun 2025 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Merekap daftar calon debitur potensial yang diunggah Pemda pada Aplikasi SIKP (Setiap bulan)</p> <p>d. Pembuatan grafik slide KPR</p> <p>e. Menjadi Notula dalam Forum Group Discussion yang membahas mengenai dampak Program KPR</p> <p>f. Menjadi notula dalam rapat pembangunan pergudangan di berbagai potensi (KDMP)</p> <p>g. Merekap dokumentasi kegiatan Juli kukurilingan, Asistensi Digipay, Bazar FKP, Bazar Kemenkeu satu, dan Mini Bazar UMKM</p> <p>h. Menginput Monev/Survei Debitur KUR Semester II Tahun 2025 tujuan survei ialah = Mengetahui ketepatan pemberian subsidi (Penyaluran KUR telah sesuai dengan ketentuan) dan mengetahui dampak pelaksanaan Program KUR khususnya dibidang Produksi (Pertanian, Perikanan, peternakan , Perkebunan)</p> <p>i. Notulen rapat sosialisasi program BPDP dan program KUR dan UMi</p>	Poppy Widiastuty

		<p>(Sosialisasi Program BDBP dan Kredit Usaha Rakyat/ KUR dan UMi) Moderator = Ibu risep septiawati Narasumber Ibu Maria immaculata sri nuryati dari Kanwil Djbp dan bapak helmi dari BPDP</p> <p>j. Notulen rapat sosialisasi UMKM produk turunan sawit (Ole food by STP Bogor) (pengenalan Produk UMKM mengandung sawit dan keunggulannya</p> <p>k. Membantu Menyiapkan Sertifikat Peserta Sinarafest</p> <p>l. Membuat dan Mendesain Laporan APID Tahun 2025 Kanwil DJPB Jawa Barat</p> <p>m. Mengikuti rapat dan Notula rapat koordinasi dwimingguan pendendalian inflasi ke 15</p> <p>n. Mengikuti rapat dan Notula rapat pembahasan hasil evaluasi setoran/ potongan dana PFK pegawai tahun 2025</p>	
01 September-31 September	Seksi PPA II C	<p>a. Meringkas Tugas dan Fungsi PPA II (Transfer ke Daerah)</p> <p>b. Menginput Hasil Kuisoner mengenai identifikasi hasil permasalahan yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>c. Meresume modul pengelolaan keuangan negara</p> <p>d. Notula FGD pembahasan hasil survei kematangan BLUD di tahun 2025</p> <p>e. Meresume modul pelaksanaan anggaran</p> <p>f. Mempelajari Peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025</p> <p>g. Monitoring dan Evaluasi TKD</p> <p>h. Analisis data menggunakan Aplikasi Eviews</p>	Ma'mun Anshori